



Meso Analisis Perumusan Peraturan tentang Pengembangan dan Pengoperasian Lapangan Padel dan Olahraga di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Amma Fathuurrahmaan Universitas Sriwijaya Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id +6285232892235	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fathuurrahmaan, A. (2026). Meso Analisis Perumusan Peraturan tentang Pengembangan dan Pengoperasian Lapangan Padel dan Olahraga di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 149-154.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan olahraga di masyarakat perkotaan modern, yang telah bertransformasi dari sekadar aktivitas fisik menjadi gaya hidup, identitas sosial, dan sektor ekonomi strategis. Fenomena ini jelas terlihat pada pertumbuhan padel yang pesat di Jakarta, ditandai dengan perkembangan pesat fasilitas lapangan padel. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi, sehingga menimbulkan berbagai masalah, khususnya keluhan masyarakat terkait kebisingan, gangguan lingkungan, dan perubahan sosial di kawasan permukiman. Situasi ini mengungkap dinamika kebijakan publik yang menarik untuk dipelajari, khususnya dalam konteks keterlambatan kebijakan dan proses perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keluhan masyarakat terkait pengoperasian lapangan padel di Jakarta dan meneliti proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan media, dan dokumen kebijakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan meso, yang menekankan interaksi antara opini publik, media, dan aktor kebijakan dalam proses penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pesat lapangan padel di Jakarta mencerminkan fenomena keterlambatan kebijakan, di mana pengembangan infrastruktur olahraga tidak disertai dengan regulasi yang memadai. Keluhan publik yang diangkat di ruang publik berfungsi sebagai masukan kebijakan dari perspektif pendekatan sistem, mendorong pemerintah untuk merespons melalui proses perumusan kebijakan. Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dapat dianalisis menggunakan model Kerangka Aliran Berganda (Multiple Streams Framework), yang dicirikan oleh konvergensi aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik dalam satu jendela kebijakan. Konvergensi ketiga aliran ini menghasilkan kebijakan seperti pembatasan jam operasional, larangan pembangunan lapangan padel di kawasan perumahan, dan penggunaan wajib sistem peredam suara. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dalam konteks olahraga perkotaan tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga merupakan hasil interaksi antara dinamika sosial, tekanan publik, dan pertimbangan politik. Oleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan partisipasi publik, dan koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Perumusan Kebijakan, Keterlambatan Kebijakan, Kerangka Kerja Multi-Aliran, Padel, Jakarta.

Abstract

This research is motivated by the development of sports in modern urban society, which has transformed from a mere physical activity into a lifestyle, social identity, and strategic economic sector. This phenomenon is clearly evident in the rapid growth of padel in Jakarta, marked by the rapid development of padel court facilities. However, this growth has not been fully matched by regulatory readiness, resulting in various problems, particularly public complaints related to noise, environmental disturbances, and social change in residential areas. This situation reveals an interesting public policy dynamic to study, particularly in the context of policy delays and the policy formulation process by local governments. This study aims to analyze the phenomenon of public complaints regarding the operation of padel courts in Jakarta and examine the policy formulation process undertaken by the DKI Jakarta Provincial Government in responding to these issues. This research uses a qualitative approach with descriptive narrative analysis methods. Data collection techniques were conducted through a literature review and analysis of secondary data from various sources, such as journals, media reports, and policy documents. Data analysis in this study uses a meso-policy analysis approach, which emphasizes the interaction between public opinion, the media, and policy actors in the agenda-setting and decision-making process. The research findings indicate that the rapid development of padel courts in Jakarta reflects a phenomenon of policy lag, where sports infrastructure development is not accompanied by adequate regulations. Public complaints raised in the public sphere serve as policy input from a systems approach perspective, prompting the government to respond through the policy formulation process. Furthermore, the policy formulation process undertaken by the Jakarta Provincial Government can be analyzed using the Multiple Streams Framework model, which is characterized by the convergence of problem streams, policy streams, and political streams within a single policy window. The convergence of these three streams results in policies such as restrictions on operating hours, a ban on padel court construction in residential areas, and the mandatory use of soundproofing systems. The research findings also indicate that policy formulation in the context of urban sports is not solely technocratic but also the result of the interaction between social dynamics, public pressure, and political considerations. Therefore, strengthening comprehensive regulations, increasing public participation, and coordination among stakeholders are necessary to create more responsive, adaptive, and sustainable policies.

Keywords: Public Policy, Policy Formulation, Policy Lag, Multiple Streams Framework, Padel, Jakarta.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi, perkembangan olahraga dalam konteks masyarakat perkotaan modern tidak lagi hanya dipandang sebagai aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Perkembangan ini telah berubah menjadi gaya hidup, identitas sosial, dan sektor ekonomi strategis. Di beberapa kota metropolitan, seperti Jakarta, dinamika ini semakin berkembang, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam padel, berdasarkan pentingnya kesehatan, interaksi sosial, dan keseimbangan di tengah tekanan kehidupan perkotaan. Fenomena ini dibuktikan dengan munculnya lapangan padel di beberapa wilayah Jakarta.

Seperti diketahui, padel adalah olahraga raket yang berasal dari Meksiko dan berkembang pesat di Eropa, khususnya Spanyol, sebelum menyebar secara global. Olahraga ini memiliki karakteristik unik, menggabungkan elemen tenis dan squash. Selain itu, olahraga ini dimainkan di lapangan tertutup dengan dinding kaca dan cenderung dapat diakses oleh orang-orang dari segala usia dan tingkat keterampilan. Keunggulan padel menjadikannya olahraga inklusif dan berbasis komunitas, yang menyebabkan pertumbuhannya yang relatif cepat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Jakarta, tren padel mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan munculnya atau pembangunan sejumlah lapangan padel, yang dibangun oleh sektor swasta dan komunitas olahraga. Lapangan padel ini tidak hanya memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang melibatkan investasi, penyediaan layanan olahraga, dan kegiatan sosial berbasis komunitas. Dari perspektif ini, padel memiliki potensi strategis untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan pariwisata olahraga di daerah perkotaan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui situs web yang melakukan penelitian, pada Juli 2025, terdapat 102 lapangan padel yang tersebar di Jakarta. Sementara itu, pada Februari 2026, terdapat 284 lapangan padel yang tersebar di Jakarta. Di antara lapangan padel yang telah dibangun, 165 berada di Jakarta Selatan, diikuti oleh 98 di Jakarta Barat, 59 di Jakarta Utara, 38 di Jakarta Timur, dan 23 di Jakarta Pusat. (<https://kumparan.com/kumparannews/ada-384-lokasi-padel-di-jakarta-naik-hampir-4-kali-lipat-dalam-7-bulan-terakhir-26rj3StYvKZ/2>, dikutip pada 27 Maret 2026)

Dari perspektif ekonomi, orang-orang kelas atas yang sebelumnya bermain golf untuk berolahraga kini beralih ke padel. Mereka bahkan rela menghabiskan jutaan rupiah untuk padel, termasuk berbagai aksesoris peralatan olahraga yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Selain itu, biaya sewa lapangan padel bervariasi, dengan tarif mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 500.000 per jam. Selain itu, banyak makelar padel mengenakan biaya hingga Rp 700.000 per jam (dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/ada-384-lokasi-padel-di-jakarta-naik-hampir-4-kali-lipat-dalam-7-bulan-terakhir-26rj3StYvKZ/full> pada 27 Maret 2026).

Popularitas padel yang semakin meningkat di kalangan warga Jakarta telah memunculkan fenomena yang menarik. Di tengah popularitas padel, terdapat respons dinamis dari warga Jakarta. Warga kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang dihasilkan oleh lapangan padel di daerah tersebut. Keluhan tersebut disampaikan pada 19 Februari 2026, melalui unggahan media sosial, di mana warga mengeluhkan kebisingan yang dihasilkan oleh bisnis lapangan padel yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Dalam unggahan mereka, warga menyatakan bahwa kebisingan dari lapangan padel sangat mengganggu aktivitas dan warga setempat. Keluhan tersebut juga dilaporkan ke aplikasi JAKI dan saluran resmi Pemerintah Provinsi Jakarta, termasuk menandai akun media sosial Gubernur Jakarta Pramono Anung (dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-8362518/muncul-keluhan-lapangan-padel-bising-pramono-akan-panggil-pengelola-pada-27-Maret-2026>).

Selain warga Cilandak, keluhan juga terdengar dari warga Pulogadung, Jakarta Timur. Salah satu warga yang keberatan dengan keberadaan lapangan padel di wilayahnya adalah Muti, warga Jalan Pulomas Barat II, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Muti mengatakan bahwa keberadaan lapangan padel telah mengubah suasana di wilayahnya secara drastis. Menurut Muti, "Banyak warga asing pindah ke sini. Berisik, banyak teriakan, dan suara bola yang dipukul sangat keras. Dan volume kendaraan yang lewat meningkat drastis. Masalah ini sebenarnya adalah akibat dari pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan." (dikutip dari <https://tirto.id/yang-jadi-korban-di-tengah-suburnya-lapangan-padel-hr1b> pada 27 Maret 2026).

Hal ini mendorong Muti dan warga lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Jakarta Timur dan Pelaksana Tugas Kepala Unit Manajemen Investasi dan Layanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jakarta Timur ke Pengadilan Negeri Jakarta (PTUN). Muti dan warga mengklaim telah berulang kali mengunjungi Unit Kelurahan (RT), Unit Kelurahan (RW), Kantor Kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta (Citata), Wali Kota Jakarta Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota. Hasilnya tetap sia-sia. (dikutip dari <https://tirto.id/yang-jadi-korban-di-tengah-suburnya-lapangan-padel-hr1b> pada 27 Maret 2026)

Banyaknya keluhan dari warga Jakarta telah ditanggapi oleh berbagai kelompok, baik melalui opini yang diungkapkan di media maupun diskusi publik yang diadakan di saluran YouTube. Sebagaimana dibahas dan diargumentasikan oleh Kompasiana, fenomena ini menunjukkan bagaimana tren gaya hidup perkotaan seringkali bertentangan dengan kenyamanan lingkungan perumahan. Oleh karena itu, Kompasiana percaya bahwa perencanaan fasilitas olahraga dan hiburan di kawasan perumahan harus mempertimbangkan aspek sosial untuk menghindari konflik di dalam masyarakat.

(https://www.kompasiana.com/azkiashiyamatasyakamila_1358786/69af3cebc925c46f59752862/lapangan-padel-viral-karena-dikeluhkan-warga, dikutip pada 27 Maret 2026)

Pemerintah Provinsi Jakarta menanggapi keluhan masyarakat, dengan Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa ia akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan membahas masalah kebisingan di lapangan padel dengan pemangku kepentingan terkait. (<https://kumparan.com/kumparannews/ada-384-lokasi-padel-di-jakarta-naik-hampir-4-kali-lipat-dalam-7-bulan-terakhir-26rj3StYvKZ/full>, dikutip pada 27 Maret 2026).

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan oleh para peneliti di atas, tampaknya pertumbuhan padel tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi tetapi juga menciptakan fenomena menarik dalam konteks pengembangan studi formulasi kebijakan publik. Di satu sisi, olahraga ini memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, kurangnya regulasi yang spesifik dan komprehensif telah menimbulkan berbagai masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti percaya bahwa diperlukan studi mendalam melalui penelitian untuk menganalisis perumusan kebijakan terkait kontroversi seputar pembangunan dan pengoperasian lapangan olahraga padel di Jakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian merumuskan pertanyaan penelitian berikut: bagaimana fenomena pengaduan masyarakat tentang kebisingan lapangan padel dan dinamika pengaduan mereka di ruang publik berkaitan dengan studi kebijakan publik? dan bagaimana proses perumusan kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian lapangan padel di Jakarta?

B. Metodologi

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis naratif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena perumusan kebijakan publik, khususnya perumusan kebijakan mengenai pembatasan operasional lapangan padel dan olahraga di Jakarta, yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, perspektif, dan dinamika yang terjadi di antara para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode ulasan naratif, dengan mengumpulkan berbagai sumber dan data yang berkaitan dengan topik penelitian (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Sumber yang digunakan adalah jurnal dan laporan media nasional dan internasional sebelumnya yang menyajikan data tentang perumusan kebijakan mengenai pembatasan operasional lapangan padel dan olahraga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data jurnalistik juga dianalisis (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Data kemudian disajikan secara naratif, membentuk informasi terintegrasi yang menyoroti aspek-aspek kunci dari topik tersebut serta aspek-aspek historis yang penting untuk memahami kausalitas suatu kebijakan. Metode tinjauan naratif ini menawarkan solusi yang mempertimbangkan semua elemen yang membentuk narasi (Ferrari, 2015, dikutip dalam Parsons 2005).

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis meso-kebijakan. Menurut Parsons (2005, hlm. 87), meso-analisis (berasal dari kata Yunani "mesos," yang berarti tengah atau perantara) adalah analisis tingkat menengah atau analisis perantara yang menekankan hubungan antara definisi masalah, penetapan agenda, dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Analisis meso-kebijakan juga merupakan metode yang berupaya untuk memeriksa dan memperdalam pemahaman tentang proses di mana para pembuat kebijakan terlibat, dengan fokus utama pada bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk menentukan agenda dan isu (Parsons, 2005, hlm. 88). Pendekatan selanjutnya mengkaji bagaimana isu dan agenda dibentuk dalam lingkungan kelembagaan: bagaimana partai, kelompok kepentingan, dan pembuat kebijakan berinteraksi untuk menentukan apa yang dianggap sebagai isu politik dan apa yang tidak (Parsons, 2005, hlm. 88).

C. Hasil dan Pembahasan

Opini dan Keluhan Warga Jakarta Mengenai Kebisingan Lapangan Padel dalam Kebijakan Publik

Pertumbuhan padel di Jakarta merupakan manifestasi perubahan gaya hidup perkotaan, yang semakin menempatkan olahraga sebagai bagian integral dari gaya hidup modern. Transformasi ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, keseimbangan kerja-hidup, dan kebutuhan akan interaksi sosial yang berkualitas. Dalam konteks ini, padel telah muncul sebagai alternatif olahraga yang relatif baru, tetapi telah mendapatkan daya tarik yang signifikan karena sifatnya yang inklusif, rekreasi, dan berbasis komunitas.

Pertumbuhan padel di Jakarta dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lapangan padel yang dibangun oleh sektor swasta, baik dalam bentuk klub eksklusif maupun fasilitas komersial terbuka. Namun, pertumbuhan yang pesat ini telah menimbulkan kekhawatiran, dengan banyak warga mengeluhkan aktivitas padel di malam hari. Hal ini telah menyebabkan protes di media sosial dan pengaduan yang diajukan ke instansi terkait. Misalnya, Muti, seorang warga Kayuputih, Pulogadung, Jakarta Timur, menyatakan: "Banyak sekali warga asing yang datang. Berisik, berteriak-teriak, dan suara bola yang dipukul. Dan volume kendaraan yang lewat meningkat drastis." Masalah ini sebenarnya merupakan akibat dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan kegagalan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan. Berdasarkan pernyataan Muti di atas, para peneliti percaya bahwa opini warga Jakarta mewakili suatu bentuk keterlambatan kebijakan, yang dijelaskan Ogburn sebagai perubahan aspek material seperti teknologi dan infrastruktur lebih cepat daripada perubahan aspek non-material seperti norma, nilai, dan peraturan. Fenomena keluhan warga ini kemudian menyebabkan keterlambatan dalam perumusan kebijakan yang mengatur pengoperasian lapangan padel.

Selain keterlambatan kebijakan, fenomena di atas juga menunjukkan bahwa opini dan tuntutan yang diungkapkan oleh sebagian warga Jakarta mengenai pengoperasian lapangan padel merupakan masukan kebijakan publik dalam pendekatan sistem yang diusulkan oleh David Easton. Opini dan tuntutan warga Jakarta terkait masukan kebijakan dari instansi terkait dan Pemerintah Provinsi

Jakarta merupakan respons publik terhadap dampak negatif pembangunan dan pengoperasian fasilitas olahraga di kawasan permukiman.

Analisis Formulasi Kebijakan Operasionalisasi Lapangan Padel di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Fenomena penanganan pengaduan masyarakat tentang pengoperasian lapangan padel telah menjadikan pengaduan ini sebagai isu kebijakan yang telah memasuki ranah publik. Sebagaimana diketahui, beberapa warga di berbagai wilayah DKI Jakarta telah menyampaikan pengaduan melalui laporan resmi kepada instansi terkait dan juga melalui media sosial kepada Gubernur DKI Jakarta. Sebagai salah satu contoh, Muti menyatakan bahwa terlalu banyak warga asing yang masuk. Berisik, sering berteriak, suara pukulan bola berisik. Dan volume kendaraan yang lewat meningkat drastis. Masalah ini sebenarnya [akibat] pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan pengusaha yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, Muti dan warga mengaku telah berulang kali mengunjungi RT; RW; Kelurahan; Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta (Citata); Walikota Jakarta Timur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Balai Kota. Hasilnya tetap nol (<https://tirto.id/yang-jadi-korban-di-tengah-suburnya-lapangan-padel-hr1b> dikutip pada 27 Maret 2026)

Berdasarkan argumen Muti di atas, kurangnya respons dari instansi terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyebabkan meningkatnya pengaduan masyarakat, yang dianggap sebagai isu penting yang membutuhkan respons segera dari Pemerintah Provinsi Jakarta. Sebagai tanggapan, Gubernur Jakarta saat itu, Pramono Anung, menyatakan bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas masalah lapangan padel yang dikeluhkan warga Jakarta. "Saya akan meminta presentasi dan untuk area-area yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak mematuhi izin yang diberikan, tentu saja Pemerintah DKI Jakarta tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut" (<https://kumparan.com/kumparannews/ada-384-lokasi-padel-di-jakarta-naik-hampir-4-kali-lipat-dalam-7-bulan-terakhir-26rj3StYvKZ/full> dikutip pada 27 Maret 2026)

Berdasarkan argumen Gubernur DKI Jakarta di atas, Gubernur menunjukkan bahwa menanggapi keluhan masyarakat merupakan langkah awal dalam perumusan kebijakan. Hal ini terlihat dari respons Gubernur yang akan membahas isu tersebut dalam agenda kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan. Menurut Anderson (2014), perumusan kebijakan adalah proses pengembangan berbagai opsi tindakan yang dapat digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, serta mencari atau memilih berbagai alternatif kebijakan dan melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan kebijakan.

Tindak lanjut Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam menangani masalah operasional seputar lapangan padel yang diangkat oleh warga adalah dengan mengadakan rapat terbatas di Pemerintah Provinsi Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025. Rapat tersebut menghasilkan penghentian penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan, hanya mengizinkan pembangunan di kawasan komersial, dan membatasi operasional padel hingga pukul 20.00. Selain membatasi jam operasional, pengelola juga diharuskan menggunakan sistem peredam suara untuk meminimalkan kebisingan yang disebabkan oleh pantulan bola dan teriakan pemain, yang telah dikeluhkan oleh warga (<https://news.detik.com/berita/d-8370014/pramono-resmi-larang-bangun-lapangan-padel-baru-di-zona-perumahan?page=3> dikutip pada 27 Maret 2026).

Menurut peneliti, keluhan yang disampaikan warga, yang memicu diskusi publik, dan tanggapan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memutuskan untuk membatasi operasi dan pembangunan lapangan padel, merupakan manifestasi dari formulasi kebijakan Kerangka Kerja Aliran Berganda yang diusulkan oleh John Kingdon (2011), yang melibatkan tiga aliran kebijakan: aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik.

Dalam problem stream, keluhan publik terkait kebisingan, gangguan lingkungan, dan potensi dampak kesehatan merupakan isu publik utama. Intensitas keluhan yang disampaikan melalui berbagai media, termasuk media sosial, telah melegitimasi isu ini dan menarik perhatian pemerintah.

Dari aspek policy stream, hal ini dapat dilihat dalam pengembangan berbagai solusi alternatif yang dirumuskan oleh para ahli, birokrat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, beberapa opsi kebijakan, seperti pembatasan jam operasional, penetapan standar ambang batas kebisingan, penerapan teknologi peredam suara, dan pengaturan zonasi fasilitas olahraga padel, merupakan serangkaian opsi solusi yang siap dipertimbangkan ketika momentum jendela kebijakan terbuka.

Dari perspektif political stream, dinamika politik yang memengaruhi proses kebijakan dapat dilihat dari besarnya tekanan publik, perhatian media, serta sikap dan respons Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam menangani isu tersebut dalam pertemuan terbatas, yang dari perspektif studi kebijakan dikenal sebagai jendela kebijakan. Kombinasi antara masalah yang terdefinisi dengan jelas, ketersediaan solusi alternatif yang layak, dan dukungan atau tekanan politik menciptakan peluang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan presentasi dan diskusi pada bagian hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti telah menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu:

Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah bahwa perkembangan pesat fasilitas olahraga padel di Jakarta, yang tidak disertai dengan regulasi yang dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif pembangunan lapangan padel, merupakan fenomena keterlambatan kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh William F. Ogburn, di mana perkembangan infrastruktur yang lebih cepat tidak disertai dengan penyesuaian kebijakan regulasi untuk pengoperasian lapangan padel. Poin selanjutnya dalam kesimpulan pertama adalah bahwa keluhan dan opini publik mengenai kebisingan dari lapangan padel di malam hari merupakan masukan dari perspektif pendekatan sistem yang diusulkan oleh David Easton. Dalam hal ini, keluhan dan opini publik berfungsi sebagai tuntutan yang mendorong pemerintah untuk merespons melalui proses perumusan kebijakan. Intensitas keluhan yang disampaikan melalui berbagai media dan platform media sosial menunjukkan tingkat tuntutan publik yang tinggi agar pemerintah mengatasi masalah ini, suatu bentuk penetapan agenda kebijakan.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah bahwa proses perumusan kebijakan untuk pengoperasian lapangan padel di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi Jakarta menunjukkan karakteristik Kerangka Perumusan Kebijakan Multi-Arus yang diusulkan oleh John W. Kingdon. Hal ini ditandai dengan konvergensi tiga arus kebijakan: arus masalah, yang menghasilkan keluhan publik tentang kebisingan dan gangguan lingkungan; arus kebijakan, yang memberikan solusi alternatif seperti membatasi jam operasional, menerapkan standar kebisingan, dan menggunakan teknologi peredam suara; dan arus politik, yang ditunjukkan oleh tekanan publik, perhatian media, dan respons pemerintah daerah. Konvergensi ketiga arus ini kemudian membuka jendela kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan konkret, seperti membatasi jam operasional, melarang pembangunan lapangan padel di daerah pemukiman, dan mewajibkan penggunaan sistem peredam suara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga hasil dari interaksi antara tekanan sosial, pertimbangan rasional, dan dinamika politik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, para peneliti kemudian membuat rekomendasi berdasarkan penelitian mereka, yaitu:

1. Merumuskan peraturan khusus terkait operasi lapangan padel, seperti ketentuan tentang zonasi pembangunan, ambang batas kebisingan, dan jam operasional berdasarkan karakteristik perumahan.
2. Memperkuat analisis dampak lingkungan dan sosial, termasuk yang terkait dengan tingkat kebisingan, fasilitas transportasi, dan kenyamanan warga.
3. Mengoptimalkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, seperti melalui forum konsultasi publik, mekanisme pengaduan yang lebih responsif, dan model pemantauan untuk implementasi dan evaluasi pembatasan operasional lapangan padel.
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

E. Referensi

Buku

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. *Administrative Science Quarterly*, 17(1), 1-25.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A "third" approach to decision-making. *Public Administration Review*, 27(5), 385-392.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (Updated 2nd ed.). Longman.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social change with respect to culture and original nature*. B.W. Huebsch.
- Parsons, W. (2005). *Kebijakan Publik: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peters, B. G. (2012). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (3rd ed.). Continuum.

Website

- <https://kumparan.com/kumparannews/ada-384-lokasi-padel-di-jakarta-naik-hampir-4-kali-lipat-dalam-7-bulan-terakhir-26rj3StYvKZ/full> dikutip pada tanggal 27 Maret 2026
- https://www.kompasiana.com/azkiashiyamatasyakamila_1358786/69af3cebc925c46f59752862/lapangan-padel-viral-karena-dikeluhkan-warga dikutip pada tanggal 27 Maret 2026
- <https://tirto.id/yang-jadi-korban-di-tengah-suburnya-lapangan-padel-hr1b> dikutip pada tanggal 27 Maret 2026
- <https://news.detik.com/berita/d-8370014/pramono-resmi-larang-bangun-lapangan-padel-baru-di-zona-perumahan?page=3> dikutip pada tanggal 27 Maret 2026